

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Pemerataan Air Bersih, Tantangan Jadi Kota Global

JAKARTA, KOMPAS — Pemerataan dan persoalan cakupan air bersih menjadi tantangan serius bagi Jakarta untuk menjadi kota global. Sebab, belum semua warga Jakarta bisa mengakses kebutuhan dasar tersebut, terlebih di wilayah utara. Pihak Perumda PAM Jaya pun membidik target 77.000 sambungan pipa baru di seluruh DKI Jakarta pada 2024.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Judistira Hermawan, menyebut bahwa kebutuhan air bersih menjadi tantangan Jakarta sebagai kota global seusaia melepas statusnya sebagai ibu kota. Hingga pengujung tahun 2023, air bersih baru menjangkau 67 persen warga Jakarta.

"Ketersediaan air bersih secara merata perlu dipikirkan dengan betul. Apalagi, ini untuk kepentingan Jakarta 3,5 tahun bahkan 10 tahun ke depan dengan status Daerah Khusus Jakarta yang sebagai satu kawasan kota global," katanya, Sabtu (4/5/2024).

Judistira menambahkan, persoalan tersebut menjadi tantangan serius bagi Pemprov DKI Jakarta. Sebab, kondisi kekurangan air bersih ini diperparah dengan perbedaan kualitas air antarwilayah. "Kita tahu, wilayah Jakarta Utara itu kualitas air atau rasa airnya berbeda dengan kualitas air di Jakarta Barat, apalagi di Jakarta Selatan. Di Jakarta Utara ini airnya agak asin," kata Judistira.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta dinilai perlu segera merancang program-program penyediaan air yang dapat berdampak luas dan berkeadilan bagi semua warga Jakarta. "Kita

ingin di tahun 2025 ada peningkatan kualitas yang lebih baik dalam hal pengelolaan dan pembangunan di Jakarta. Khususnya pemerataan cakupan air bersih," ujar Judistira.

DPRD DKI mendesak Pemprov DKI menyediakan sanitasi yang layak, antara lain, guna membantu mengatasi tengkes (*stunting*), khususnya, serta kesehatan dan kesejahteraan masyarakat umumnya.

Sebab, perbaikan sanitasi dinilai bukan hanya melalui perbaikan asupan gizi, melainkan juga perbaikan lingkungan tempat tinggal, seperti penyediaan air bersih yang baik. Peningkatannya harus dilakukan dengan memasukkan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dengan mengerahkan sumber daya dan program yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, berpendapat, Pemprov DKI Jakarta dan PAM Jaya harus memastikan juga layanan terbaik bagi warga terkait ketersediaan air bersih. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga perlu memastikan air jernih dan tidak berbau, kuantitas pasokannya terjamin setiap hari, produksinya selalu cukup dan kontinu, serta jaringan perpipaannya tidak bocor.

Pemprov DKI Jakarta juga dinilai perlu mengoptimalkan layanan sanitasi berkelanjutan dengan menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD). Dengan demikian, capaian akses pelayanan air limbah meningkat, kualitas lingkungan membaik, penyakit yang disebabkan oleh kualitas air tanah berkurang, serta sumber alternatif air baku dan air

bersih tersedia.

"Masalah sanitasi di Jakarta harus menjadi perhatian serius agar masyarakat di seluruh wilayah Jakarta memiliki lingkungan bersanitasi baik. Pemprov DKI Jakarta memang harus mendirikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal pada tingkat RT/RW/kecamatan/kecamatan sehingga pengelolaan air limbah dapat selesai di tiap tingkat secara berjenjang," kata Nirwono.

Untuk pelayanan air bersih dan sanitasi, lanjut Nirwono, Pemprov DKI Jakarta harus segera mengintegrasikannya. Sebab, sejauh ini, pelayanan air bersih masih menyisakan beberapa persoalan. "Contohnya, (pemerintah) belum mampu melayani kawasan-kawasan yang sangat membutuhkan, seperti di permukiman Jakarta Utara. Begitu pula sanitasi, belum sepenuhnya berhasil. Masih ada warga yang buang air besar di tepi sungai," ujarnya.

Nirwono menilai Pemprov DKI Jakarta perlu segera menyusun visi agar warga Jakarta nantinya bisa langsung minum dari keran, seperti di Singapura dan kota-kota besar di negara maju lainnya. Selain itu, jaringan perpipaan air limbah harus dipisahkan dengan saluran air kota atau drainase.

Meningkatkan pasokan

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Hendri menyebut, saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah meningkatkan pasokan air bersih melalui instalasi pengolahan air (IPA) permanen atau stasioner dan pembangun-

an waduk serta embung.

"Dinas SDA DKI mendukung program peningkatan akses layanan air bersih kepada masyarakat melalui pembangunan instalasi pengolahan air bersih Dinas SDA (DKI Jakarta), yaitu penyediaan IPA Mobile," katanya.

Selain itu, Dinas SDA DKI Jakarta menyediakan mobil tangki air untuk membantu daerah yang mengalami krisis air. Lalu, membuat waduk atau embung konservasi air tanah dan kebijakan terkait pengelolaan air bersih.

"Kami juga mendukung program layanan perpipaan air bersih Perumda PAM Jaya untuk mencapai layanan perpipaan 100 persen pada 2030," ujar Hendri.

Perumda PAM Jaya membidik target 77.000 sambungan pipa baru di seluruh DKI Jakarta pada 2024. Target sebanyak ini belum pernah ada di PDAM mana pun sehingga pihaknya harus bekerja luar biasa. "Target kami tahun ini 77.000 sambungan pipa baru. Ini angka yang belum pernah dialami oleh suatu kota untuk menyambung air," kata Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin.

Arief menuturkan, layanan PAM Jaya saat ini sudah mencapai 9.000 sambungan menuju 13.000 sambungan baru. Selain itu, dia berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengambil alih sumber air yang bisa didapatkan untuk mendukung target ini.

PAM Jaya juga telah menuntaskan pembangunan empat reservoir komunal atau tempat penampungan air bersih skala

besar untuk memenuhi kebutuhan pasokan air bagi masyarakat di beberapa wilayah di DKI Jakarta. Keberadaan reservoir komunal ini akan dirasakan oleh 42.000 warga dari 7.560 sambungan.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, program penyediaan air bersih hingga pengurangan kemacetan menjadi program prioritas seusaia ibu kota Indonesia berpindah dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

"Setelah ibu kota pindah, program prioritas Jakarta yang pertama salah satunya ialah menambah kemampuan pemda DKI dalam memberikan pelayanan air bersih," kata Heru.

Terkait pelayanan air bersih di DKI Jakarta, kata Heru, PAM Jaya bersama pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR tengah memperbaiki dan membenahi hal-hal terkait persiapan air bersih. "PAM Jaya sekarang sedang memperbaiki dan membenahi bersama pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, termasuk Bendungan Karian hingga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur," ujarnya.

Heru menyebut, 69 persen warga Jakarta sudah dapat menikmati layanan air bersih perpipaan dari PAM Jaya per April 2024. Namun, masih ada revitalisasi perbaikan pipa sekunder dan pipa primer.

Menurut Heru, persoalan air bersih paling banyak terjadi di utara Jakarta. Pihaknya pun terus berupaya memperluas cakupan layanan air bersih perpipaan hingga ke utara. (TIK)